

**PENERAPAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA
ATAS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SUPRAPTO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum atau tindak pidana bagi pelaku usaha yang hasil produksinya telah menyebabkan kerugian atau kematian bagi konsumen yang menggunakan hasil produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori Negara hukum, dan teori asas pertanggung jawaban.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal atau doctrinal research, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analitis induktif, yang bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan diakhiri dengan penemuan asas-asas hukum atau doktrin.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen sebagaimana pada kasus Biscuit Merie Super, yang telah mengakibatkan lima orang anak meninggal. Tindak pelaku usaha ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (3) tetapi juga pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 205, Pasal 306, dan Pasal 386. Dalam kasus Biscuit Merie Super, Tan Chandra Helmi sebagai Direktur Utama CV. Gabisco Tangerang adalah pelaku usaha dan sekaligus pengurus perusahaan, patut diberikan sanksi baik sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai korporasi. Jadi sebagai pelaku usaha, dapat dikenakan sanksi pidana enam tahun penjara sedangkan sebagai korporasi dapat dituntut dengan Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Saran yang diberikan sanksi pidana yang diberlakukan untuk korporasi patut dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran terhadap konsumen oleh korporasi. Untuk itu, diperlukan adanya revisi atas undang-undang perlindungan konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dari tindakan semena-mena pelaku usaha dan korporasi dengan memuat penerapan prinsip tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pelaku Usaha Atas Perlindungan Konsumen

APPLICATION FOR ACTORS BUSINESS CRIME OF VIOLATION OF LAW NUMBER 8 1999 ON CONSUMER PROTECTION

SUPRAPTO

ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of legal sanctions or criminal offense for businesses whose products have caused harm or death to consumers who use the results of the production is based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Code and the Penal Code. The theory used in this research is the theory of justice, rule of law theory, and the theory of the principle of accountability.

The method used is dokrinal or doctrinal research studies, the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Legal materials were collected and analyzed using inductive analytical method, which is based on the premises that form of positive legal norms which are known and ended with the discovery of the principles of law or doctrine.

Results of this study concluded that a criminal act against businesses that commit violations of the consumer as in the case of Biscuit Merie Super, which has resulted in five children died. Acts of business operators is not only considered as a violation of Article 62 paragraph (3) but also a violation of the Code of Penal (Penal Code) Article 205, Article 306, and Article 386. In the case of Merie Super Biscuit, Tan Chandra Helmi as Director CV. Gabisco Tangerang is the business and management of the company at the same time, sanctions should be given either as businessmen but also as a corporation. So as businesses, may be subject to criminal penalties of six years in prison, while a corporation can be prosecuted with Article 61 and Article 63 of the Consumer Protection Act.

Advice given criminal sanctions imposed on the corporation should be done in an effort to prevent violations of the consumer by the corporations. To that end, the necessary revision of consumer protection laws as an effort to provide consumers to protection from persecution businesses and corporations by loading the application of the principle of absolute liability.

Keywords: Crime Business Actors Over Consumer Protection